



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : JAKA SUCIPTA
2. Jabatan : DIREKTUR DANA DESA, INSENTIF, OTONOMI KHUSUS, DAN KEISTIMEWAAN
3. NHK : 132699

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.170.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/100 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
2. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 164 m2/55 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 620.000.000
4. Bangunan Seluas 180 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
5. Bangunan Seluas 210 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 520.000.000

1. MOBIL, HONDA MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
2. MOBIL, TOYOTA MOBIL PENUMPANG Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 390.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 155.787.200

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.817.394.240

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 4.663.181.440



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 4.663.181.440

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.